

DAFTAR PUSTAKA

- Adisti, N. A., Mardiansyah, A., & Yuningsih, H. (2021). Pelaksanaan Rehabilitasi Pengguna Narkotika. *LEX LIBRUM : JURNAL ILMU HUKUM*, 8, 29–48.
- Adrianto, R. (2021). *Dimensi Aksesibilitas Layanan Kesehatan Komunitas Multi Etnis* (A. Ramadhani (ed.); Pertama). Penerbit Garis Khatulistiwa (Anggota IKAPI). <https://repository.unmul.ac.id/bitstream/handle/123456789/50676>
- Badan Narkotika Nasional. (2016). Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba. Jakarta : Deputi Bidang Rehabilitasi
- Badan Narkotika Nasional. (2017). Narkoba Dan Permasalahannya. Jakarta : Deputi Bidang pencegahan
- Defri, D. (2018). UPAYA PENYIDIK MELAKUKAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI MENURUT UNDANG-UNDANG NARKOTIKA (Studi Pada Satres Narkoba Polres Kepulauan Mentawai). *UNES Law Review*, 1(1), 28–43. <https://doi.org/10.31933/law.v1i1.4>
- Gani, I., Muliati, & Amalia, S. (2015). PEMETAAN MASYARAKAT SEBAGAI TARGET GROUP PROGRAM CSR PT. PKT BONTANG Irwan Gani, Muliati, dan Siti Amalia Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman, Kampus Gunung Kelua Samarinda. *Sosiohumaniora*, 17(1), 28–34.
- Hidayati, P., Hakimi, M., & Claramita, M. (2017). Kesehatan Tingkat Pertama Kasus Kegawatdaruratan Maternal Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Di 3 Puskesmas Perawatan Kota Bengkulu. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 6(02), 94–102.
- Mataram, U. M. (2020). *Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.*
- Musdalifah. (2015). PERAN BALAI REHABILITASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) TANAH MERAH DALAM MEREHABILITASI PECANDU NARKOBA DI KOTA SAMARINDA. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 3(2) 718-730.

<https://id.scribd.com/document/706668860/Jurnal-ipah-05-20-15-09-34-37>

- Purwanto, F. R., Parman, L., & Sabardi, L. (2019). Implementasi Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika (Studi Di Rumah Sakit Jiwa Dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Education and ...*, 7(2), 280–287. <http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1131>
- Partodiharjo, S. (2008). Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya. Jakarta: Esensi, Erlangga.
- Putri, A. D., Puspitasari, & Utami, D. S. (2021). Pengaruh Stigmatisasi pada Penyalah Guna Narkotika Berdasarkan Gender terhadap Kecenderungan Penggunaan Berulang di Balai Rehabilitasi BNN. *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, 4(1), 15–32. <https://doi.org/10.7454/jkskn.v4i1.10043>
- Sugiarti, R. A. (2023). The problem with stigma: identifying its impact on drug users and recommendation for interventions. *Psikologia: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi*, 18(2), 113–126. <https://doi.org/10.32734/psikologia.v18i2.11320>
- Siti Zubaidah., (ed. Nurika K). (2011). Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu. Medan: IAIN PRESS
- Suharmiati, Handayani, L., & Kristiana, L. (2012). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Daerah Terpencil Perbatasan di Kabupaten Sambas (Studi Kasus di Puskesmas Sajingan Besar). *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 15(03), 223–231. <https://media.neliti.com/media/publications-test/21346-faktor-faktor-yang-memengaruhi-keterjang-cdf92541.pdf>
- Trysal, M. (2022). Stigma Masyarakat terhadap Mantan Pengguna Narkoba di Kelurahan 24 Ilir Palembang. *Jurnal Empirika*, 6(2), 139–158. <https://doi.org/10.47753/je.v6i2.110>

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, pecandu Narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional sebagai dasar pembentukan BNN

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kota.

Surat Edaran Badan Narkotika Nasional No. 98 tahun 2022 tentang pelaksanaan asesmen terpadu di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor

Sumber Lain (Internet)

<https://bnn.go.id/sidang-istimewa-pbb-bahas-penanganan-narkoba/> (diakses Senin, 26/02/2024)

<https://sumut.bnn.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/> (diakses Selasa, 19/03/2024)

[Pelayanan Publik Prima: Antara Harapan dan Kenyataan di Era Masyarakat](#)

[Cerdas 5.0 - Jurnal Security](#) (diakses Kamis, 07/03/2024)

<https://www.bhuanajaya.desa.id/akses-terhadap-layanan-publik-mengoptimalkan-keterbukaan-pemerintah-untuk-kemudahan-masyarakat/> (diakses Kamis, 07/03/2024)